

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Insolvency Practitioners Regulation Act 2019. Section 13.
Jandri Onasis Siadari, Nomor 231 K/Pid/2015, Mahkamah Agung, 4 Juni 2015.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1132.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 50.
Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Pasal 2 dan 14.
Kode Etik Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Bagian Pertama Prinsip Etika dan Profesi. Prinsip Pertama Independensi dan Benturan Kepentingan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 1 Ayat 5, Pasal 10 Ayat 1 butir (b), Pasal 15 Ayat 1, 2, 3, Pasal 71 Ayat 1, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 69 Ayat 2 butir (a), Pasal 109, Pasal 70, dan Pasal 72.

Buku

- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249.
Imran Nating, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 6.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 22.
Lukman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IX (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), Hlm 250.
M. Philipus Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 117.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm 88.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press. Hlm. 64.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.
Rusli, T. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Hlm 16.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

Muhammad Rayhan Fasya Akbar, 2026

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Sururie, R. W. (2022). Putusan pengadilan. Hlm 50.
- Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), Hlm 80.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53 dan 54.
- Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm 207.
- Shubhan, M. H. (2015). Hukum Kepailitan. Prenada Media. Hlm 1, 25, 108, dan 109.
- Simanjuntak, Ranto Parulian. Pemidanaan Terhadap Kurator Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2025. Hlm. 74, 125, 134, dan 173.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo, hlm 5.
- Sunaryati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Hlm 6.
- Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing. Hlm 5.
- Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing. Hlm 16.

Karya Ilmiah

- Adistia, S. T., & Wijayanta, T. (2022). Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus Dan Pemberes Harta Pailit. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 341-353. DOI : <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.77537>.
- Al Mufti, M. Z. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Lex Renaissance*, 1(1), 6-6.
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Conceição, A. F., Frade, C., Benedetti, L., Maśnicka, M., Hollemans, R., & Jesus, R. (2023). Supervision and liability of insolvency practitioners in EU and national law. *Revista Electrónica de Direito*, 30(1), 6–26. https://doi.org/10.24840/2182-9845_2023-0001_0002.
- Calvin, J. (2025). Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 Pk/Pdt. Sus-Pailit/2015. *Binamulia Hukum*.

- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *to-ra*, 2(3), 429-436. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Golu, R. J. M., Wibisono, M., & Muhyidin, A. (2024). Karakteristik Profesi dan Profesi Hukum Kaitannya dengan Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 69-81. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1649>.
- HidAyat, A. (2017). Hak Tenaga Kerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 23-32.
- Jazuri, M., & Dahlan, Y. Z. PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN. *Jurnal Ilmu Hukum ISSN*, 2302, 0180.
- Kartoningrat, R. B. (2016). Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas. *Perspektif*, 21(2), 113-124. Doi : <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.186>.
- Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 3(2).
- Kamahayani, M., & Margono, S. (2020). Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 71-91. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8892>.
- Kusumadewi, D. P. (2024). Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pt Ny. Meneer). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(3), 175-185. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9449>.
- Larmi Kristiani (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Demi Kepentingan Harta Pailit Dengan Melakukan Gugatan Actio Pauliana (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN. JKT. SEL)”. <https://doi.org/10.46257/jrh.v22i1.31>.
- Lariwa, Y. (2018). Fungsi dan Peran Kurator dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit. *Lex Et Societatis*, 6(1).
- Lesmana, M. D., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2024). Problematika Praktik Kepailitan di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 134-146.
- Mutmainnah, M., BN, A. M. T., & Jamaluddin, S. (2023). Konsep Profesi Perspektif Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 21-39. DOI : 10.61292/eljbn.v1i3.52.
- Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. (2025). REFORMASI SISTEM KEPAILITAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN DEBITOR. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 152-163.
- Nurrohim, M., & Erma, Z. (2023). Rights Of Bankrupt Debtors In The Management And Settlement Process In Accordance With Law Number

Muhammad Rayhan Fasya Akbar, 2026

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- 37 OF 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU. PENA LAW: International Journal of Law, 1(3), 51-62.
- Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. (2025). REFORMASI SISTEM KEPAILITAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN DEBITOR. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 152-163.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), 49-58.
- Putra, S. D. (2023). Analisis Mengenai Penerapan Prinsip Debt Collection dan Ketiadaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2), 28-33.
- Putri, F. A., Anggriani, J., & Deni, F. (2025). Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.908>.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).
- Singal, N. Y. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Lex Privatum*, 10(1).
- Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retentum*, 2(2). DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v2i2.710>.
- Simanjuntak, H. A. (2019). Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan. *Jurnal Justiqqa*, 1(1). DOI : <http://dx.doi.org/10.36764/justiqqa.v1i1.221>.
- Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum kepailitan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Sulolipu, A. B., & Handoyo, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 60-82.
- Sultan, A. (2023). Kewenangan Kurator atas Implementasi Business Going Concern Principle dalam Pengurusan Boedel Pailit. *Officium Notarium*, 3(2), 101-108. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art1>.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU.

Muhammad Rayhan Fasya Akbar, 2026

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), 130-137.
10.31289/jiph.v6i2.2963.

Wiradharma, I. B. A., & Sukihana, I. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pembersihan Harta Debitor Pailit. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 6(04).

Website

Fachri, Ferinda Khairunnisa. (28 Agustus 2023). Tapak Tilas 'Nahkoda' AKPI dari Masa ke Masa. Hukum Online. Akses pada 5 Desember 2025. Melalui

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tapak-tilas-nahkoda-akpi-dari-masa-ke-masa-lt64eca2779b292/?page=all>.

Hukum Online (2 Maret 2015). Organisasi Kurator Diminta Bersatu. Diakses pada 20 Desember 2025. Melalui

<https://www.hukumonline.com/berita/a/organisasi-kurator-diminta-bersatu-lt54f3d2ff21e2d/>.

FNH (18 Agustus 2016). Kriminalisasi Kurator, UU Kepailitan Tak Bisa Disalahkan. Diakses pada 19 September 2025. Melalui:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kurator--uu-kepailitan-tak-bisa-disalahkan-lt57b58a508208d>.

Novia Heriani, Fitri (10 Juni 2025). Menimbang Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Profesi Kurator. Diakses pada 22 November 2025. Melalui:

<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt684776341f55c/menimbang-urgensi-pembentukan-uu-perlindungan-profesi-kurator/>.

Raja Basar Abraham Novanda Harefa. Berapa Lama Proses Pembersihan Harta Pailit?. Hukum Online. Diakses pada 13 Desember 2025. Melalui

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-proses-pembersihan-harta-pailit-lt67379c06443a6/>.

Sulaiman, Alfin (22 April 2014). Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus. Hukum Online. Diakses pada 17 Desember 2025. Melalui

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-lt53560215cad4f/?page=all>.

Wijaya, Adi Surya (20 Mei 2025). Apa itu Pencocokan Piutang di Perkara Kepailitan? Ini Tahapannya. ILS Law Firm. Diakses pada 12 Desember 2025. Melalui

<https://www.ilslawfirm.co.id/pencocokan-piutang-kepailitan/>.

Williamson, Cooper (May 20 2024). What is an insolvency practitioner and what are their duties?. Begbies Traynor Group. Retrieved on December 24 2025. From

<https://www.begbies-traynorgroup.com/articles/director-advice/what-is-an-insolvency-practitioner-and-what-are-their-duties>.

Muhammad Rayhan Fasya Akbar, 2026

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Skripsi dan Tesis

- Firmansyah, 2013, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diakses pada 7 desember 2025.
- Juniresta, A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- RIDLWAN, M. P. Z. M. (2019). PENYIMPANGAN BENTUK UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT AKIBAT PKPU GAGAL Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/Pdt. Sus-Pailit/2014 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Stephany. H. R. (2015). Urgensi Pemberian Hak Imunitas Kepada Kurator Saat Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Sumber-sumber lainnya

- Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat (kurator PT Sritex). Pada 25 September 2025.